



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Pantaskah keluarga jatuh miskin akibat judi online diberi bansos
: Rabu, 19 Juni 2024
: Rakyat Merdeka
: 2

Pantaskah Keluarga Jatuh Miskin Akibat Judi Online Diberi Bansos

USULAN agar korban judi online (judi online) yang diterima bantuan sosial (Bansos) yang dicetuskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamad Effendy (Effen) mendapat kritik.

Selain panen kritik, Muhamad coba melepas korban. Kata dia, bansos ini untuk korban yang benar-benar miskin.

Awalnya, saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Kamis (13/6), Muhamad menyatakan bahwa korban dari judi yang semakin mengkhawatirkan. Salah satunya, banyak masyarakat yang berstatus miskin akibat kecanduan judi.

Muhamad kemudian mengusulkan untuk memasukkan korban judi sebagai penerima bantuan. Namun, usulan agar korban judi menerima

bantuan mendapat banyak kritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) politisi, akademisi, hingga rakyat biasa, mendak korban judi dapat bantuan.

Setelahnya itu banyak diprotes, Muhamad coba meluruskan. Kata dia, penerima bantuan ini bukanlah korban judi yang terkena dampak secara finansial maupun psikologis. Korban judi yang terkena dampak atau anak-anak polaku.

"Kalausaiapjudi, makanya, maka itu yang memerlukan bantuan," kata dia.

Ada di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2024).

Mantan Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan ini menambahkan, keluarga pelaku judi pun tidak berhak mendapatkan bantuan. Mereka harus melewati proses verifikasi sebelum mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurutnya, para korban harus bisa memastikan bahwa mereka bukanlah pelaku atau aktor korangan kecanduan judi online.

Dengan demikian, baru bisa masuk kategori penerima bantuan. "Pada dasarnya, kalau judi kemudian miskin, langsung dibagi-bagi bantuan, bukan bantuan."

Alasan mengusulkan korban judi jadi penerima bantuan, menurutnya, sesuai dengan amanat UUD, Pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua fakir miskin, dan anak-anak ter-

lantar dipelihara oleh negara. "Orang miskin itu tidak berhak mendapat bantuan. Semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi tumpangan," ujarnya.

Ketua Bidang Kehuromatani, Bisnis, dan Industri Muhammadiyah Pusat (PKB) Nur Wahid menolak usulan Menko PMK tersebut. Menurut dia, pemberian bantuan ini adalah simpati kepada korban judi online.

"Cobat saja usulan itu. Lebih baik mewujudkan korban judi online bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukan karena judi online. Tapi, kita tetap memberi sanksi secara hukum," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni menyatakan, pemberian bantuan tidak mungkin menyebabkan seseorang menjadi miskin.

"Saat didat, penerima bantuan tidak

akan ditanya, miskinya karena apa. Akibatnya, miskinya karena apa. Akibatnya, judi online atau lainnya," ujar Obon kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (18/6/2024).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Konservatif (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak usulan Menko PMK tersebut. Menurut dia, pemberian bantuan ini adalah simpati kepada korban judi online.

"Cobat saja usulan itu. Lebih baik mewujudkan korban judi online bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukan karena judi online. Tapi, kita tetap memberi sanksi secara hukum," ujarnya.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Obon Tabroni dan Hidayat Nur Wahid.

HIDAYAT NUR WAHID,
Anggota Komisi VIII DPR

Seperti Bersympati Kepada Judi Online



“

Narasi ini, seperti ada unsur simpati terhadap judi online yang berdampak kepada keluarga pelakunya. Kalau judinya menguntungkan, maka tidak dipermasalahkan.

OBON TABRONI,
Anggota Komisi VIII DPR

Pemberian Bansos Tidak Lihat Apa Penyebabnya



“

Dalam sistem penerimaan bantuan, tidak ditanya miskinya itu akibat apa. Akibat tidak dapat warisan, akibat judi atau lainnya. Tidak pernah ada kriteria seperti itu.

Bagaimana pandangan Anda tentang pemberian bantuan pada pelaku judi online?

Sehingga, pemberantasan judi online ini, sejatinya, merupakan tugas TNI-Polri. Ketua Kesbangpol DKI (DKPS) itu membutuhkan verifikasi dari pihak RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Apakah seorang sudut rumah tangga yang dilaporkan benar-benar agor di lapak togel. Tapi, yang harus diambil adalah, penerima yang ternyata bukan adalah, penerima yang miskin.

Menko Muhamad mengatakan, pemberian bantuan ini ada atas permintaan faktor sosial dan anak-anak terlantar, dipelihara manusia. Tegangan Anda?

Perlu pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online, apa tanggapan Anda?

Menko Muhamad menuturkan, korban setan judi online. Apalagi, belakangan Pak Jokowi bilang Indonesia dirinti nadi online.

Terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online, apa tanggapan Anda?

Menko Muhamad menuturkan, korban setan judi online. Apalagi, belakangan Pak Jokowi bilang Indonesia dirinti nadi online.

Itungnya sangat banyak dan dampak ke korbaninya sangat mengheran, seperti kasus Pinjaman membakar seorang ibu hamil di Medan.

Judi, sebenarnya apa yang disampaikan oleh pejabat sejalan dengan langkah pemberantasan judi online. ■■■

Adakah masalah apa dengan narasi?

Narasi ini, seperti ada unsur simpati terhadap judi online yang berdampak kepada keluarga pelakunya.

Kalau judinya menguntungkan, maka tidak dipermasalahkan. Seolah-olah seperti itu diketahui saya yakni, Pak Menko PMK yang benar-benar benar.

Mestinya, semua pihak menjadi bagian yang mengingatkan agar tidak adanya keleluasaan terhadap judi

online. Sehingga, pemberantasan judi online ini, sejatinya, merupakan tugas TNI-Polri.

Ketua Kesbangpol DKI (DKPS) itu membutuhkan verifikasi dari pihak RT, RW, kelurahan dan sebagainya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

syarat-syaratnya. Di antaranya, termasuk dalam Daftar Tercantum Kesiijahatan Daerah (DKPS) itu

membutuhkan verifikasi dari pihak RT, RW, kelurahan dan sebagainya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.

Apakah tidak akan membebani bantuan pemerintahan sosial, jika kebutuhan penerima bantuan berasal dari akibat judi?

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak miskin, maka Pemerintah harus membantunya dengan program-program yang ada.

Akan dibutuhkan kondisi tertentu saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti

itu, pemberian bantuan karena faktor penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak meredak. Untuk itu, orientasi kita bukan kepada penyebabnya, namun pada kondisinya.